

# BAKTI UNPATTI

(Journal of Community Service)



**LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS PATTIMURA  
AMBON**

**PEMBINAAN PENGUSAHA USAHA MIKRO PADA  
PASAR TRADISIONAL WAYAME**  
*Fanny M. Anakotta*

**PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI PEMBERIAN KETRAMPILAN RUMAH  
TANGGA MISKIN MENGELOLA SUMBER DAYA LOKAL DI NEGERI  
HUTUMURI KOTA AMBON**  
*Prapti Murwani dan Ishaka Lalihun*

**PELATIHAN PEMBUKUAN USAHATANI DI DESA HUTUMURI KECAMATAN  
LEITIMUR KOTA AMBON**  
*Ester D. Leatemia dan R. Milyaniza Sari*

**PELATIHAN TEKNIK BUDIDAYA TOMAT DALAM POT MENGGUNAKAN  
URIN (SAPI SEBAGAI PUPUK**  
*Hermelina Sinay*

**PERAN MASYARAKAT DALAM LINGKUNGAN HIDUP**  
*Izack Timisela*

**KELOMPOK USAHA BUDIDAYA RUMPUT LAUT DI DUSUN TOISAPU  
DESA HUTUMURI KOTA AMBON**  
*Fransesca Soselisa dan T. Tjio*

**PEMBINAAN PENGUSAHA IKAN OLAHAN DALAM PENGEMBANGAN  
INDUSTRI IKAN OLAHAN DI DESA GALALA KOTA AMBON**

*Wilda R. Payapo*

**RANCANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM TES KEBERHASILAN  
PEMBELAJARAN BERBASIS KOMPUTER SMK MUHAMMADIYAH AMBON**

*Nasir Suruali dan Imran Oppier*

# PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI PEMBERIAN KETRAMPILAN RUMAH TANGGA MISKIN MENGELOLA SUMBER DAYA LOKAL DI NEGERI HUTUMURI KOTA AMBON

PRAPTI MURWANI  
ISHAKA LALIHUN

## ABSTRAK

Perubahan paradigma pembangunan dari top down planning menjadi bottom up planning menjadikan pemberdayaan masyarakat pada aras lokal menjadi penting. Salah satunya adalah dengan pemanfaatan sumber daya alam yang mereka miliki. Negeri Hutumury adalah salah satu negeri adat yang sangat kaya akan sumber daya alam akan tetapi masyarakatnya masih dalam kategori miskin. Sehingga dengan kesadaran melalui proses sosialisasi di masyarakat tentang peningkatan nilai jual sumber daya alam yang mereka miliki sangat diperlukan. Aktifitas ini berlangsung selama 6 bulan dengan metode pendampingan. Dan hasilnya masyarakat sangat mendukung dengan kegiatan ini.

**Kata Kunci : Top Down Planning, Bottom Up Planning, Nilai Jual Sumber Daya**

### Latar Belakang

Salah satu tujuan pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bahkan dalam salah satu pasal dalam UUD 45 yang menjadi dasar dari negara kita menyebutkan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Akan tetapi pembangunan justru menimbulkan kesenjangan pendapatan antara yang kaya dan yang miskin. Bahkan angka kemiskinan menunjukkan peningkatan. Program pembangunan cenderung menina bobokkan warga miskin, dengan selalu memanjakan warga miskin dengan senantiasa memberikan bantuan sementara bantuan yang diberikan tidak bisa dikelola dengan baik, bahkan program-program pengentasan kemiskinan yang ada hanya sebatas program tidak tepat sasaran.

Paradigma pembangunan yang selama ini bersifat Top Down sudah mulai berubah. Penataan proses kebijakan publik dengan mengutamakan partisipasi

masyarakat sangat diperlukan dalam melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan. Hal ini mengisyaratkan bahwa pengentasan kemiskinan bukan semata-mata menjadi tanggung jawab dari pemerintah akan tetapi merupakan tanggungan secara menyeluruh yaitu pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.

Meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan keluarga yang dicerminkan oleh meningkatnya kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Diharapkan dengan terpenuhinya kebutuhan keluarga maka keluarga sejahtera bisa tercapai. Program ini dilakukan melalui peningkatan pemberdayaan keluarga dalam bidang usaha ekonomi produktif khususnya bagi warga miskin.

Peningkatan angka kemiskinan juga terjadi di Kota Ambon. Kemiskinan di Kota Ambon bisa ditunjukkan di desa Hutumuri Kecamatan Leitimur Selatan, yang merupakan kecamatan pemekaran. Data BPS menunjukkan bahwa angka

kemiskinan di Negeri Hutumuri adalah 46,68%. Sementara sumber daya alam di Negeri ini masih sangat tinggi untuk bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Ironinya masyarakat tidak menyadari akan potensi sumber daya alam yang dimiliki, yang sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya guna mengurangi angka kemiskinan di wilayah ini. Bahkan di Wilayah negeri Hutumuri juga terdapat Koperasi Unit Desa yang sangat maju dengan suntikan dana yang besar dari dinas koperasi. Kondisi inilah yang dirasakan penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya kepada rumah tangga miskin untuk memberikan penyadaran bahwa mereka sebenarnya mampu untuk keluar dari rantai kemiskinan dengan memanfaatkan potensi dari daerah yang mereka tempati.

Lingkungan alam yang masih asri harusnya bisa menopang kebutuhan hidup warganya, apalagi nilai-nilai adat yang masih sangat kuat, bisa menjadi modal sosial yang sangat berarti untuk bisa dimanfaatkan khususnya bagi warga miskin di wilayah ini. Negeri Hutumuri juga memiliki sumber daya laut yang kemanfaatannya masih belum maksimal. Mereka hanya sekedar menangkap hasil seperti ikan dan sejenisnya yang kemudian di jual di pasar, akan tetapi belum mengolah untuk bisa meningkatkan nilai jual yang lebih tinggi.

### **Perumusan Masalah**

#### **Identifikasi Masalah**

Dari hasil observasi awal menunjukkan bahwa Negeri Hutumuri adalah salah satu negeri adat di wilayah Kota Ambon dengan angka kemiskinan yang tergolong tinggi di Kota Ambon. Permasalahan yang ada di wilayah ini diantaranya adalah:

1. Kurangnya kemampuan warga miskin dalam mengidentifikasi sumber daya alam yang bisa untuk

meningkatkan kondisi ekonomi mereka.

2. Rendahnya management dalam memasarkan hasil olahannya.
3. Rendahnya modal yang dimiliki untuk keberlangsungan usahanya.

### **Tujuan Kegiatan**

Adapun tujuan dalam kegiatan ini adalah:

1. Memberikan pemahaman melalui penyadaran akan sumber-sumber daya alam yang bisa membantu mendukung peningkatan pendapatan mereka.
2. Meningkatkan Kemampuan managerial warga miskin melalui pengarahan dan pemahaman warga miskin.
3. Memberikan pemahaman kepada rumah tangga miskin agar bisa memberdayakan diri sendiri melalui kegiatan-kegiatan ekonomi produktif khususnya bagi para istri.

### **Output Yang Diharapkan**

1. Rumah tangga miskin mampu mengidentifikasi sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan untuk bisa keluar dari kemiskinan.
2. Rumah Tangga miskin mampu untuk mengerakkan potensi diri melalui kegiatan ekonomi produktif.
3. Rumah tangga miskin mampu melakukan manajemen baik keuangan maupun pemasaran dari kegiatan ekonomi produktif yang dilakukan
4. Rumah tangga miskin mampu meningkatkan kesejahteraannya dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan pokoknya.
5. Rumah tangga miskin mampu mandiri keluar dari kemiskinan tanpa mengharapkan program dari pemerintah.

### **Manfaat Kegiatan**

Diharapkan setelah mengikuti kegiatan ini peserta dapat

1. Rumah tangga miskin mampu mengidentifikasi sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan untuk bisa keluar dari kemiskinan.
2. Rumah Tangga miskin mampu untuk mengerakkan potensi diri melalui kegiatan ekonomi produktif.
3. Rumah tangga miskin mampu melakukan manajemen baik keuangan maupun pemasaran dari kegiatan ekonomi produktif yang dilakukan
4. Rumah tangga miskin mampu meningkatkan kesejahteraannya dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan pokoknya.
5. Rumah tangga miskin mampu mandiri keluar dari kemiskinan tanpa mengharapkan program dari pemerintah.

## LANDASAN TEORI

### 1. Kemiskinan

Pengalaman, perspektif, sudut pandang yang diambil, dan terkadang dari ideologi yang dianut. Diawali hanya aspek ekonomi, berbagai pemikiran baru tentang kemiskinan yang memasukkan aspek ketidakberdayaan (*powerlessness*) dan keterkucilan (*isolation*), kerentanan (*vulnerability*) dan keamanan (*security*) muncul sebagai konsep yang banyak dikaitkan dengan kemiskinan. Selain itu juga dikembangkan pemahaman mengenai penghidupan yang berkelanjutan (*sustainable livelihood*) (Ellis, 1998). Amartya Sen kemudian menekankan perlunya meningkatkan kemampuan individu yang memungkinkan mereka melaksanakan kegiatan dalam masyarakat. Belakangan juga dimasukkannya relasi gender dalam konsep kemiskinan. Akhirnya, pada 1990an konsep kemiskinan diperluas dengan munculnya gagasan mengenai kesejahteraan (*well-being*) dan ketertinggalan sosial (*social exclusion*). Perkembangan itu mengilhami pengertian

kemiskinan dalam Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK, 2004), yang mendefinisikan sebagai kondisi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya (meliputi hak atas pangan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan berusaha, perumahan, air bersih dan sanitasi, tanah, sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dan hak untuk berpartisipasi dalam keseluruhan proses pembangunan) untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

Menurut Sajogyo mengukur batas kemiskinan dari tingkat penghasilan atau pengeluaran rumah tangga setara beras per kapita per tahun yaitu 480 kg untuk kota dan 320 kg untuk desa. Sementara garis kemiskinan yang digunakan BPS mengacu kepada besarnya nilai pengeluaran (dalam rupiah) per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum pangan dan nonpangan. Sedangkan Bank Dunia mengukur kemiskinan dengan penghasilan PPP US \$ 1 per hari per kapita.

BKKBN menggolongkan tingkat kemiskinan didasarkan 22 ukuran yaitu : Adapun indikator-indikator untuk mengukur taraf keluarga sejahtera dengan menggunakan acuan BKKBN adalah sebagai berikut :

#### Keluarga sejahtera tahap I

1. Anggota keluarga melaksanakan ibadah menurut agama yang dianut masing-masing
2. Pada umumnya seluruh anggota makan dua kali sehari atau lebih
3. Seluruh anggota keluarga memiliki pakaian berbeda-beda di rumah, bekerja, sekolah, dan bepergian
4. Bagian yang luas dari lantai rumah bukan berupa tanah.
5. Bila anak sakit atau pasangan usia subur ingin ber-KB di bawa kesarana/petugas kesehatan serta diberi obat/ cara KB modern.

### **Keluarga sejahtera tahap II**

6. Anggota keluarga melaksanakan ibadah secara teratur menurut agama yang dianut masing-masing
7. Paling kurang sekali seminggu keluarga menyediakan daging/ ikan/ telur sebagai lauk pauk
8. Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang 1 stel pakaian setahunterakhir
9. Luas lantai rumah paling kurang 8 meter persegi untuk tiap penghuni rumah.
10. Seluruh anggota keluarga dalam 3 bulan terakhir dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan tugas/ fungsi masing-masing.
11. Paling kurang 1 anggota keluarga usia 15 tahun ke atas mempunyai penghasilan tetap.
12. Seluruh anggota keluarga yang berumur 10 – 60 tahun bisa baca tulisan latin.
13. Seluruh anak usia 5 – 15 tahun bersekolah pada saat ini.
14. Bila anak hidup 2 atau lebih, keluarga yang masih berstatus pasangan usia subur memakai kontrasepsi (kecuali bila sedang hamil).

### **Keluarga sejahtera tahap III**

15. Keluarga mempunyai upaya untuk meningkatkan pengetahuan agama
16. Sebagian dari pendapatan dapat disisihkan untuk tabungan keluarga.
17. Keluarga biasanya makan bersama paling kurang sekali sehari dan kesempatan itu dimanfaatkan untuk berkomunikasi antar anggota keluarga
18. Keluarga biasanya ikut serta dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya.
19. Keluarga mengadakan rekreasi bersama/ penyegaran di luar rumah paling kurang satu kali dalam 6 bulan.
20. Keluarga dapat memperoleh berita dari surat kabar/ radio/ televisi/ majalah.

21. Anggota keluarga mampu menggunakan sarana transportasi sesuai kondisi daerah.

### **Keluarga sejahtera tahap III Plus**

22. Keluarga atau anggota keluarga secara teratur (pada waktu tertentu) dan sukarela memberikan sumbangan bagi kegiatan sosial masyarakat dalam bentuk materi. Kepala keluarga atau anggota keluarga aktif sebagai pengurus perkumpulan/yayasan/ institusi masyarakat

### **23. Pemberdayaan Rumah Tangga Miskin**

Kieffer (1984: 9 [dalam Soeharto, 1977: 212-213), ketidakberdayaan merupakan hasil pembentukan interaksi terus-menerus antara individu dan lingkungannya yang meliputi kombinasi antara sikap penyalahan-diri sendiri, perasaan tidak dipercaya, keterasingan dari sumber-sumber sosial dengan perasaan tidak mampu dalam perjuangan politik. Dengan demikian orang miskin baik akibat kebudayaan dan struktural adalah sama, statis = ketidakberdayaan sehingga perlu diberdayakan. Merujuk pada Black (dalam Gardner dan Lewis, 2005: 192), pemberdayaan dilukiskan sebagai ihwal “mengasuh, memerdekakan dan bahkan memberi tenaga kepada kaum miskin dan tidak berdaya”. Dari sinilah kebijakan penanggulangan kemiskinan lebih banyak diarahkan pada upaya-upaya pemberdayaan dan fasilitasi partisipasi masyarakat miskin dalam kegiatan masyarakat, asumsinya akan menciptakan peluang bagi mereka untuk meningkatkan taraf hidupnya. Menurut Sajogyo (2002) pemberdayaan kaum miskin adalah kunci pengentasan kemiskinan. Ada yang memahami pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor

kehidupan. Pemberdayaan berangkat dari realitas obyektif yang merujuk pada kondisi struktural yang timpang dari sisi alokasi kekuasaan dan pembagian akses sumberdayamasyarakat (Breton, 1994). Dia juga mengatakan bahwa realitas subyektif perubahan pada level individu (persepsi, kesadaran dan pencerahan), memang penting, tetapi sangat berbeda dengan hasil-hasil obyektif pemberdayaan: perubahan kondisi sosial. "Setiap individu tidak bisa mengembangkan kemampuan dirinya karena dalam masyarakat terjadi pembagian kerja yang semu, relasi yang subordinatif, dan ketimpangan sosial", demikian tulis Heller (1994: 185).

Pemberdayaan diasumsikan melibatkan partisipasi kaum miskin dan menempatkan mereka sebagai subyek pembangunan. Partisipasi menjadi wacana penting gerakan pembangunan global pada dasawarsa 80-an. Titik utama pendekatan ini adalah pelibatan kaum miskin sehingga preskripsi pembangunan merefleksikan kepentingan mereka dari pada rencana. Pelibatan kaum tentu tidak saja karena asumsi ontologism bahwa semua orang punya hak yang sama, tetapi juga karena pandangan epistemologis bahwa kebenaran ataupun pengetahuan bukan hanya monopoli dari rencana atau peneliti saja, tetapi juga kaum miskin. Keberanan juga bersifat inter-subyektif sehingga penggaliannya harus melalui proses-proses partisipatif (Fakih, 2002). Pendekatan partisipatoris dalam penanggulangan kemiskinan ini semakin populer ketika Bank Dunia memahami kemiskinan dengan menggunakan pendekatan yang kini banyak dikenal dengan *Participatory Poverty Assessment (PPA)* dalam *Consultation with the Poor/Voices of the Poor* yang dimulai pada 1999 dengan melibatkan 23-60 negara, termasuk Indonesia.

Masalahnya kemudian, konsep pemberdayaan dalam penanggulangan

kemiskinan di Indonesia banyak meminjam pendekatan terhadap kemiskinan yang berlaku di negara-negara maju seperti Amerika Serikat di mana orang miskin adalah minoritas, khas secara ras atau etnik, dan memiliki sejarah perbudakan di masa silam. Model-model penanggulangan kemiskinan tersebut biasanya memandang orang miskin sebagai kelompok-kelompok yang hidup sebagai kantung-kantung masyarakat di perkotaan. Indonesia dalam banyak hal sangat dipengaruhi oleh pendekatan seperti itu. Sebagai contoh, model-model yang diusulkan oleh Mukherjee (1999), World Bank (2001), dan Mukerjee, Harjono, Carriere (2002), yang menanggapi orang miskin sebagai kelompok-kelompok sosial yang perlu diberdayakan dan difasilitasi. Bantuan bagi orang miskin yang paling menonjol belakangan ini adalah uang tunai, yang ternyata juga penuh muatan manipulatif.

### Metodologi Pelaksanaan

Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah proses pengidentifikasian sumber-sumber daya alam yang ada di wilayah Hutumuri. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan wawancara pada segenap tokoh masyarakat yang ada di wilayah ini dalam memanfaatkan sumber daya alam dan pengolahannya. Selanjutnya melakukan sosialisasi ke masyarakat tentang pemanfaatan sumberdaya alam sehingga masyarakat sadar bahwa sumber daya alam yang mereka miliki dapat memberikan kontribusi yang cukup bagi peningkatan perekonomian keluarga.

Adapun peserta yang mengikuti kegiatan ini adalah sebanyak 15 orang yang terdiri dari kelompok-kelompok kecil yang ada di wilayah negeri Hutumuri. Dengan tahapan-tahapan pelaksanaannya adalah Tahap Persiapan Administrasi

meliputi Rapat Persiapan Penyuluhan, Pendekatan Sosial Ke Lapangan, Pendekatan kelapangan ini dilakukan agar kami bisa diterima oleh pemerintah Hutumuri dan bisa dihubungkan pada kelompok-kelompok sasaran kemudian dilanjutkan persiapan Bahan dan Alat-alat Kerja dengan ; Masyarakat Negeri Hutumuri mengolah Tahap selanjutnya adalah Tahap Pelaksanaan Penyuluhan/ sosialisasi yang meliputi ; Kegiatan tahap pertama ini dilakukan dengan memberikan arahan kepada warga berupa penyuluhan dan mengidentifikasi potensi-potensi lokal yang mereka miliki untuk dimanfaatkan dalam menunjang ekonomi keluarga dan Pelaksanaan Kegiatan terakhir dari pelaksanaan kegiatan adalah evaluasi dan Penyusunan laporan Kegiatan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dijadualkan selama 6 bulan dari tahap pelaksanaan sampai dengan evaluasi dan monitoring.

## HASIL DAN PELAKSANAAN

Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah :

### 1. **Gambaran Umum Pelaksanaan Kegiatan**

Pelaksanaan kegiatan berlangsung secara baik bahkan dukungan dari pemerintah negeri sangat baik. Hal ini ditunjukkan dengan antusias dari pemerintah negeri dari penerimaan kita awal pelaksanaan sampai dengan akhir kegiatan. Selain itu pemerintah negeri juga memfasilitasi pelaksana dengan menyediakan tempat untuk melakukan sosialisasi dan juga memfasilitasi pelaksana untuk mendatangkan warga dalam pelaksanaan kegiatan.

Pelaksanaan Kegiatan di ikuti oleh 15 Peserta dan semua peserta berasal dari negeri Hutumuri. Peserta berasal dari kelompok-kelompok masyarakat yang sudah ada di wilayah negeri ini, akan tetapi usaha kelompok-kelompok ini belum menunjang kebutuhan hidup dari

keluarganya. Peserta sosialisasi juga menunjukkan antusias dalam pelaksanaan kegiatan hal ini ditunjukkan dengan beberapa pertanyaan yang dilontarkan sebagai rasa ingin tahunya mereka.

### 2. **Pelaksanaan kegiatan**

Pelaksanaan Penyuluhan :

Tahap kegiatan ini di ikuti oleh 15 warga masyarakat yang berlokasi di Kantor Desa Hutumuri Kecamatan Leitimur Selatan Kota Ambon.

1. Pembukaan, dalam acara penyuluhan dan sosialisasi ini dibuka secara resmi oleh bapak raja Hutumuri selaku raja dari pemerintah Negeri Hutumuri. Beliau memberikan arahan kepada warga tentang pentingnya kegiatan dari penyuluhan ini.

2. Pelaksanaan penyuluhan. Pelaksanaan penyuluhan diawali dengan memberikan pemahaman kepada para peserta akan pentingnya pemberdayaan sehingga mereka bisa keluar dari kemiskinan tanpa mengharapkan dari pemerintah pusat, kemudian dilakukan dengan mengidentifikasi kekayaan negeri hutumuri yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam sesi ini juga dijelaskan tentang bagaimana meningkatkan nilai jual sumber daya alam menjadi semakin tinggi. Dari identifikasi sumber daya alam ternyata negeri Hutumuri memiliki sumber daya alam yang sangat besar diantaranya :

#### 1. Jagung

Warga negeri Hutumuri biasanya menjual jagung dari sawah langsung dibawa ke pasar tanpa mengolah menjadi nilai jual yang lebih tinggi. Padahal seandainya pemerintah negeri bisa bekerja sama dengan super market yang ada di Ambon maka bisa dikemas dalam kemasan plastik dan dijual di supermarket, dari pada super market harus mengambil dari luar daerah, kenapa

tidak memanfaatkan sumber daya alam yang mereka miliki.

## 2. Sagu

Masyarakat Negeri Hutumuri memiliki beberapa kelompok yang mengolah sagu mentah menjadi sagu lempengan, sebagai makanan khas masyarakat Ambon pada umumnya. Mereka sebatas menjual sagu seperti masyarakat pada umumnya, sementara masyarakat lain telah lebih awal mengolah sagu menjadi makanan yang memiliki nilai jual yang tinggi. Hal ini yang perlu dilakukan dengan memberikan ketrampilan kepada kelompok-kelompok untuk mengolah sagu menjadi makanan dengan nilai jual yang lebih tinggi.

## 3. Ikan

Akses pasar propinsi yang tergolong dekat menjadikan warga menjual hasil tangkapan langsung kepasar. Biasanya hasil tangkapan langsung di jual dipasar. Disisi lain Ikan bisa diolah dan diawetkan misalnya dengan membuat ikan kalengan sehingga bisa dipasarkan keluar daerah, tidak sebatas di wilayah ambon saja.

## 4. Pala

Pala juga merupakan salah satu kekayaan warga negeri Hutumuri. Pala juga belum dimanfaatkan oleh warga dengan baik. Mereka menjual pala hanya sebatas isinya saja. Padahal kulit pala bisa dimanfaatkan untuk dibuat sirup ataupun manisan dengan dikemas secara menarik dan bisa dipasarkan keluar daerah sehingga bisa meningkatkan ekonomi mereka.

Hasil Identifikasi sumber daya alam yang dimiliki warga maka sebenarnya negeri Hutumuri mampu mengeluarkan warganya dari kondisi kemiskinan mereka. Hal yang pertama dilakukan adalah penyadaran warganya dan memberikan ketrampilan warga untuk bisa mengolah sumber daya alam yang dimiliki sehingga memiliki nilai jual yang tinggi. Dukungan pemerintah negeri juga diperlukan sehingga warga bisa memberikan celah yang baik untuk

membuka akses baik dengan pemerintah daerah maupun koperasi yang mereka miliki. Keberadaan koperasi yang cukup besar di wilayah ini sebenarnya memberikan ruang yang cukup lebar bagi warga negeri untuk bisa meningkatkan perekonomian keluarganya.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### 1. Kesimpulan

Kegiatan pengabdian di Negeri hutumuri berhasil dilaksanakan dengan dihadiri oleh 15 peserta kegiatan. Dan kegiatan ini juga mendapat apresiasi yang baik dari masyarakat hal ini ditunjukkan dengan antusias warga yang sangat komunikatif dan sangat mensupport pelaksanaan kegiatan ini. Warga juga berharap perlu diadakan kegiatan yang serupa seperti dengan mendatangkan dari Balai Latihan kerja, karena warga di Negeri hutumuri juga memiliki keahlian dalam bidang anyaman yang akhir-akhir ini mulai surut karena pembinaan yang kurang, dan perhatian dari pemerintah daerah yang tidak ada.

### 2. Saran

Rekomendasi yang bisa penulis berikan adalah :

1. Bagi pemerintah daerah perlu juga bekerja sama dengan BLK untuk memberikan pelatihan dan pendampingan, karena masyarakat negeri Hutumuri juga memiliki ketrampilan dalam anyaman. Bahkan dari raja negeri Hutumury sangat mengharapkan sekali.

## DAFTAR PUSTAKA

Alfian, Mely G. Tan, Selo Sumarjan. (1980). *Kemiskinan Struktural*. Suatu Bunga Rampai. Jakarta: Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial.

*Kantor Menteri Negara Kependudukan / BKKBN, 2008 . Jakarta; BKKBN*



Mukerjee, N, J.Harjono, E. Carriere  
(2002) *People, Poverty, and Livelihood: Links for*

Mukerjee, N. (1999) *Consultation with the Poor in Indonesia: Country Synthesis Report*. Jakarta : The World Bank.

Suharto, Edi. (1997). *Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran*. Bandung: Lembaga Studi Pembangunan-STKS.

Suparlan, Parsudi. (1993). *Orang Gelandangan di Jakarta: Politik pada Golongan Termiskin*. Dalam Parsudi Suparlan(ed.) *Kemiskinan di Perkotaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

World Bank (2001) *Poverty Reduction in Indonesia: Constructing a New Strategy*. Jakarta : The World Bank.